

PASANG SURUT HUBUNGAN SIPIL MILITER DI INDONESIA DAN
TANTANGANNYA PADA MASA DEPAN NKRI

Oleh

Syamsul Hilal¹⁾, Afrizal Hendra²⁾, Tri Legionosuko³⁾, Helda Risman⁴⁾

^{1,2,3}Prodi Strategi Perang semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI

Email: samsulhilal9877@gmail.com

Abstrak

Hubungan Sipil Militer di Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang panjang, berbagai perbedaan pandangan mewarnai dan kerap terjadi antara pihak sipil dan pihak militer dalam menentukan keberlangsungan hidup NKRI, dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Keterpaduan antara sipil dan militer dengan membangun kepercayaan dan saling memahami. Tujuan penelitian ini berusaha mendeskripsikan harmonisasi serta kerjasama hubungan Sipil Militer secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan mengedepankan peran dan fungsi masing-masing. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) dari buku-buku, jurnal, dokumen, media internet/website, serta literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HSM harus diatur dan dikelola mengacu kepada kaidah-kaidah keilmuan, karena HSM merupakan kunci yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan hidup dan matinya suatu negara. Komponen-komponen bangsa dapat menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan keutuhan dan keberlangsungan suatu negara dan bangsa.

Kata Kunci: Hubungan Sipil Militer, Cita-Cita, Tujuan Nasional

PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa Indonesia ingin mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan semua itu tentunya tidak dapat diperoleh dengan mudah, dibutuhkan perjuangan, kerja keras, pengorbanan dan semangat pantang menyerah dari segenap komponen bangsa. Perjuangan dalam mencapai cita-cita bangsa tidak sebanding dengan perjuangan yang telah dilakukan para pendiri bangsa ini, jauh lebih sulit dalam berjuang memperoleh kemerdekaan NKRI, penuh dengan pengorbanan harta benda, air mata, darah, bahkan jiwa raga.

Oleh karenanya tidak berlebihan para pendiri bangsa ini menetapkan persatuan kesatuan bangsa, bhinneka tunggal ika,

wawasan nusantara dan nasionalisme sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana komitmen para anak bangsa, sejak era berdiri *Budi Utomo* dan peristiwa *sumpah pemuda* sampai dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa kemerdekaan dan cita-cita perjuangan bangsa hanya bisa diwujudkan dengan menempatkan persatuan, keterpaduan, kerjasama, hubungan yang terkoordinasi antara semua komponen bangsa, baik itu masyarakat sipil dan militer. Membahas masalah Hubungan Sipil Militer di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dalam upaya membentuk NKRI.

Sipil dan Militer memiliki kontribusi yang sangat penting dalam proses memerdekakan NKRI, walaupun dalam sejarah Hubungan Sipil Militer di Indonesia sering terjadi perbedaan pandangan, pendapat

dan menetapkan keputusan krusial dalam proses perjuangan memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa awal berdiri pemerintahan RI, seperti pada: “*Peristiwa Agresi Belanda II tahun 1948 di Yogyakarta ketika Presiden Sukarno yang meminta Jendral Sudirman untuk menyerah kepada Belanda sebagai bagian dari Diplomasi Presiden, tetapi dengan tegas Jendral Sudirman menolak dengan tetap ingin melanjutkan Perang Gerilya untuk menjaga eksistensi NKRI*”, contoh lain pada masa reformasi, “*Peristiwa lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI diklaim pihak militer bahwa supremasi Sipil tidak dapat berbuat banyak dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI*”,

Hubungan sipil militer yang kurang harmonis tersebut puncaknya terjadi pada zaman Orde Baru (ORBA) ketika dominasi militer memberangus dominasi sipil hampir di seluruh bidang pemerintahan dengan *Dwifungsi ABRI* yang tentunya bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (2000) bahwa Hubungan Sipil Militer (*Civil-Military Relations*) adalah *kontrol sipil (civilian control) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relatif sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif maupun objektif sipil*, pada bagian lain Huntington (1981) menambahkan bahwa *kontrol sipil dibagi menjadi tiga pola: kontrol sipil oleh lembaga pemerintah, kontrol sipil oleh kelas sosial, dan kontrol sipil secara konstitusional*.

Dwifungsi adalah sebuah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas yaitu; *Pertama*, Pengatur Negara. ABRI akan berperan sebagai sosok yang turut serta dan memiliki andil tinggi dalam mengatur negara. Hal ini berarti bahwa ABRI mampu menyalurkan pendapat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum terbaru sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. *Kedua*, Kekuatan Pertahanan. Tugas utama ABRI adalah menjadi kekuatan pertahanan

yang mampu melindungi negara dan masyarakat dari segala bentuk bahaya yang mengancam.

Dwifungsi sekaligus digunakan sebagai pembenaran militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen pihak militer juga memiliki andil yang kuat dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.

Pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru sebagai wujud dari puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi militer di pemerintahan ORBA terjadi peristiwa demonstrasi besar besaran di Jakarta dan juga terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Aksi Reformasi tersebut mempunyai tuntutan agar segera mereformasi bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi, di antara tuntutan aksi tersebut adalah penghapusan *Dwifungsi ABRI*. Tuntutan penghapusan doktrin *Dwifungsi ABRI* yang mendorong tentara meninggalkan posisi dan peran pada politik formalnya sejak 2004 dan mengharuskan TNI kembali ke tugas-tugas di bidang pertahanan dan menjadikan jati diri TNI sebagai *tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional dan tentara profesional* menjadi lebih fokus. Akan tetapi satu hal yang perlu dipahami dan menjadi perhatian dalam memperbaiki hubungan sipil militer, tidak hanya dengan mewujudkan profesionalisme militer atau dengan meninggalkan panggung politik ataupun mengurangi aktivitas bisnisnya, akan tetapi juga ditandai dengan keberadaan militer yang menghormati dan mematuhi pemerintahan sipil yang berdaulat karena, militer merupakan alat negara.

Pasang surut hubungan sipil militer yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah fenomena dikotomi Sipil-Militer perlu diakhiri, dengan perbaikan hubungan atas dasar kepentingan nasional dan tujuan nasional. Hampir di seluruh negara dunia memahami harmonisasi Hubungan Sipil-Militer menjadi kata kunci kestabilan dan keberlangsungan

kehidupan suatu negara, seperti yang diungkapkan oleh Huntington pada *Teori Ajensi* bahwa: *kontrol sipil obyektif adalah meyakinkan bahwa elit militer semakin efektif dengan catatan meminimumkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional*. Untuk itu perlu adanya penata ulang hubungan sipil militer yang lebih konkrit, dalam sebuah negara demokrasi dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, dalam rangka menggapai cita-cita nasional dan kemerdekaan.

Tujuan penelitian ini berusaha mendiskripsikan harmonisasi dan kerjasama hubungan Sipil Militer dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan bersama-sama mengedepankan peran dan fungsi secara profesional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini dan masa nanti, sehingga tidak terjadi dikotomi yang berkepanjangan yang dikawatir akan mengganggu proses tercapainya tujuan nasional.

METODE PENELITIAN

Menurut Samuel P. Huntington bahwa ada dua model konsep yang menjelaskan bagaimana kontrol sipil dilakukan, berupa *Subjective Civilian Control (Maximizing Civilian Control)* yaitu memaksimalkan kekuasaan sipil, diartikan bahwa model ini sebagai upaya meminimalisasi kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan kelompok-kelompok sipil. *Objective Civilian Control (Maximizing Military Professionalism)* yaitu memaksimalkan profesionalisme militer dan menunjukkan bahwa adanya pembagian kekuasaan politik antara kelompok militer dan kelompok sipil yang kondusif menuju perilaku profesional. Sedangkan menurut Stanislav Andreski dalam *Journal of Strategic Studies 3* yang berjudul “*On the Peaceful Disposition of Military Dictatorship*”, bahwa, tentara yang tidak punya perang atau persiapan perang akan tergoda untuk campur tangan dalam politik, dalam sudut pandang jangka panjang,

tampaknya ada hubungan timbal balik antara perang besar dan *praetorianisme* (intervensi militer ke dalam politik demokrasi dan mengalahkan dominasi).

Pada bagian lain Alexandra R. Wulan mengatakan Dalam era reformasi memahami reformasi militer, memiliki dua pemahaman, yaitu; 1. profesionalisme militer dan, 2. hubungan sipil-militer yang ideal. Reformasi militer diarahkan untuk membangun militer yang ideal. Tiga karakter ideal militer yaitu: 1. ahli dalam bidangnya (profesi), 2. memiliki semangat korps yang positif (semangat korporasi/ kerjasama), dan 3. mengetahui tempat dan fungsinya (profesionalisme politik).

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dari buku-buku, jurnal, dokumen, media internet/*website*, serta literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dibahas untuk dikaji, dianalisa dan diteliti yang pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu dikotomi (pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan) Sipil dan Militer sejak dulu kerap mengemuka sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi seperti sekarang ini, walaupun isu tersebut kurang mendapat pengakuan oleh sebagian kalangan, namun pada kenyataan harus diakui bahwa isu itu masih terjadi sampai dengan sekarang. Disadari maupun tidak disadari isu ini dapat menjadi kendala bahkan menjadi sebuah ancaman bagi integrasi bangsa dan negara, yang bisa saja berubah dijadikan peluang bagi pihak asing untuk memanfaatkan situasi ini dengan menjalankan asimetris dan proxy.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono pernah mengatakan dalam membangun negara tidak ada yang namanya dikotomi atau perbedaan antara sipil dan militer, bahkan semua elemen baik TNI

maupun masyarakat harus bersatu padu menjaga keutuhan NKRI. Beliau menambahkan seluruh elemen bangsa tidak hanya TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI. Sinergitas antara elemen bangsa dibutuhkan dalam membangun bangsa atau negara.

Pendapat Kasad tersebut menyadarkan kita akan arti penting hubungan sipil dan militer, untuk dapat bisa memahami dan mengerti urgensi hubungan Kerjasama. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengkaji dan menelaah peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Hubungan Sipil dan Militer pada masa lalu dengan harapan mendapatkan informasi yang terkait, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menata HSM kearah yang lebih baik..

Sejarah Hubungan Sipil Militer (HSM)

Dikotomi HSM di Indonesia sudah terjadi sejak awal diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perbedaan yang dominan terjadi terkait kebijakan atau keputusan pemerintah sipil yang selalu mengambil jalur diplomasi politik dalam menghadapi pihak penjajah Jepang maupun Belanda yang nyata-nyata hanya ingin menguasai kembali bumi nusantara. Setelah Jepang mendeklarasikan kalah perang pasca peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Alasan pihak sipil menggunakan jalur diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan adalah untuk mencegah korban perang yang lebih banyak. Bentuk diplomasi penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda yaitu dengan melakukan perundingan seperti *Perundingan Renville* dan *Linggarjati*.

Menurut pihak militer jalur perundingan yang dilakukan oleh pihak sipil dianggap gagal, selalu berakhir dan menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, diantara kesepakatan perjanjian Renville yang merugikan itu adalah semakin sempitnya wilayah RI dan bentuk pemerintahan Republik

Indonesia Serikat (RIS). Selain itu perjanjian yang dihasilkan juga selalu dikhianati dan dilanggar oleh pihak Belanda itu sendiri, dan kondisi ini menyebabkan pihak militer/TNI menjadi ragu-ragu dalam melaksanakan strategi perang menghadapi Belanda. Pihak militer/TNI ingin mengusir Belanda dari Indonesia dengan strategi berperang yang diyakini strategi yang paling efektif dan terbaik, seperti yang telah dilakukannya pada perang merebut kemerdekaan RI dan tren ini juga telah dilakukan oleh sebagian negara di dunia sebagai cara yang efektif dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Puncak kekecewaan dan ketidakpercayaan pimpinan militer kepada pemerintah sipil kala itu, ditunjukkan ketika Panglima Besar Sudirman diperintahkan oleh Presiden Sukarno untuk menghentikan serangan kepada Belanda sebagai konsekuensi Perjanjian Renville dan Linggarjati, namun Panglima menolak dan tetap akan melaksanakan perang gerilya melawan Belanda. Pada kenyataannya Panglima Besar Sudirman dapat membuktikan pendapatnya kepada pemerintah sipil dengan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 merebut kota Yogyakarta dari tangan Belanda selama 6 jam, yang sangat mempengaruhi dan mengintervensi keberadaan Belanda di Indonesia oleh dunia Internasional.

Peristiwa lain yang dapat dilihat pada tanggal 17 Oktober 1952 yaitu peristiwa yang menarik dalam kancah sejarah HSM di Indonesia, dimana pihak militer mengarahkan meriam ke Istana Presiden dan berhadapan langsung dengan Presiden dan menuntut agar parlemen untuk dibubarkan. Hal ini terjadi karena pihak militer beranggapan bahwa *pertama*, kabinet merencanakan untuk memperkecil jumlah militer dengan memberhentikan 80.000 dari 200.000 personel dengan alasan usia lanjut, *kedua*, adanya keinginan Kolonel Supeno untuk menurunkan Jenderal A.H Nasution dari jabatannya selaku KASAD karena tidak setuju untuk

memprofesionalkan Angkatan Darat melalui suratnya yang disampaikan ke parlemen. Melihat peristiwa ini tentunya mengingatkan kita bahwa perbedaan sudut pandang antara sipil dengan militer dapat berpotensi terjadinya kehancuran suatu negara.

Pada perkembang selanjutan era 1950 sampai dengan 1960 di Indonesia terjadi sistem pemerintahan parlementer dan kepolitikan yang liberal telah menyebabkan tingginya derajat instabilitas politik. Kabinet silih berganti, memunculkan berbagai kepentingan kelompok di dalamnya. Politisi sipil saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya sehingga stabilitas pemerintahan tak kunjung tercapai. Diselenggarakannya pemilu tahun 1955 justru semakin menguatkan persepsi dari kalangan militer yang melihat bahwa telah terjadi instabilitas politik.

Sementara itu, ketidakpuasan dari tindak tanduk kalangan elite telah menimbulkan pemberontakan di daerah-daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, seperti PRRI, DI/TII, dan Permesta. Kondisi ini menyebabkan mau tak mau TNI turun tangan untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan nasional.

Kondisi ini sering terjadi di Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Peran tentara saat itu sangatlah besar dan terkadang tidak ada kontrol sipil atas operasi-operasi yang dilakukan. Tentara sering kali melakukan perlawanan terhadap agresi asing ataupun gerakan pemberontakan atas inisiatif sendiri, tanpa komando Presiden.

Dari berbagai peristiwa yang terjadi dimana pihak militer selalu berkontribusi positif dan memberikan solusi penyelesaian dari setiap permasalahan yang terjadi, sehingga menciptakan stabilitas nasional yang terkendali. Tetapi dilain sisi kondisi ini menimbulkan perasaan bahwa pihak militer merasa pihak paling berjasa dalam mengatasi setiap ancaman bangsa.

Dominasi ini kemudian berlanjut pada era Orde Baru, namun dengan model supremasi yang berbeda. Berlakunya doktrin *Dwifungsi ABRI* telah menjadikan kekuatan militer benar-benar mendominasi aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan apa yang dikatakan bahwa relasi sipil militer yang otoritaria telah terjadi, yang lebih disebabkan karena belum kuatnya kontrol sipil atas militer, sehingga keberadaan pemerintahan sipil sering diabaikan dan yang semakin membawa pihak militer semakin jumawa.

Diawali dengan adanya pemberontakan G 30 S/PKI yang secara cepat dapat diatasi oleh ABRI dan rakyat, kemudian diperburuk lagi dengan adanya krisis politik yang tidak menentu akibat Presiden Sukarno enggan untuk menyelesaikan kasus G 30 S/PKI. Krisis ekonomi menjadi semakin parah, masyarakat menjadi tidak puas sehingga akhirnya munculnya *Tiga Tuntutan Rakyat* (TRITURA). Peristiwa G30S/PKI memunculkan kembali ide *Dwifungsi ABRI* yang pernah digagas oleh Jenderal A.H. Nasution pada HUT Akademi Militer Nasional di Magelang pada 13 Nopember 1958, dimana ABRI berperan juga di luar pertahanan dan keamanan. Ide yang dikemukakan ini lebih dikenal dengan "*Konsepsi Jalan Tengah ABRI*".

Dwifungsi ABRI sebenarnya adalah sebuah konsep yang baik dalam perannya menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia, sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik yang memberikan peluang terhadap peranan terbatas bagi TNI di dalam pemerintahan sipil. Pada masa ini peran militer sangat didominasi oleh peran sosial politiknya daripada peran yang sebenarnya yaitu sebagai alat pertahanan keamanan.

Sebagai kekuatan sosial politik ABRI penugaskaryaan dalam lembaga/instansi diluar jajaran ABRI sebagai bagian dari pelaksana Dwi Fungsi ABRI. Selain itu kiprahnya di dunia politik ditandai dengan Keterlibatan ABRI, tidak saja ada pada *sektor eksekutif*

tetapi juga *sektor legislatif* melalui partai Golongan Karya. Sekalipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, namun mereka memiliki wakil dalam jumlah besar dalam DPR dan MPR melalui Fraksi Karya ABRI. Tujuan dari penugasan itu adalah untuk pengamanan politik ideologis terutama pada saat awal pemerintahan orde baru dan menyukseskan pembangunan nasional.

Setelah 32 tahun supremasi militer berkuasa melalui Dwifungsinya dijalankan menjadikan HSM di Indonesia menjadikan dikotomi atau trauma yang berkepanjangan bagi pihak sipil, yang sangat terasa sampai dengan saat ini, dan kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi keberlangsungan HSM suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Hubungan Sipil Militer (HSM) Saat Ini.

Pasca berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, ditandai dengan Presiden Suharto menyatakan pengunduran diri dari Jabatannya, merupakan babak baru dari HSM pada Era Reformasi, secara otomatis peran Dwifungsi TNI dikurangi atau dihapus sebagai bagian dari salah satu agenda Reformasi. Mengacu dari teori HSM seperti yang telah dikemukakan diatas, respon cepat yang dilakukan TNI dengan menarik diri dari kedudukannya di legislatif yang seharusnya berakhir pada tahun 2009, dipercepat pada tahun 2004.

Paradigma baru TNI dilakukan sebagai bentuk upaya TNI untuk memperbaiki HSM dan menjalan amanah reformasi dengan melakukan validasi organisasi di tubuh TNI yang salah satunya dengan menghapus jabatan Kasospol TNI menjadi Kaster TNI pada level Mabes TNI.

Dengan demikian TNI telah menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil dan legislatif, TNI kembali ke barak dan kembali ke Jati Diri TNI *Tentara Pejuang, Tentara Rakyat, sebagai Tentara Nasional dan Tentara Profesional* dan fokus

tugas pada bidang pertahanan. Konsekuensi lain dari kebijakan reformasi yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan, konsolidasi dan pengendalian pihak sipil atas militer adalah dengan mengeluarkan militer dari lingkaran dalam, dengan menempatkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan.

Namun pada kenyataan HSM di Era Reformasi, pihak sipil belum sepenuhnya untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pihak militer. Fenomena ini tentunya bertentangan dengan konsep HSM pada masa kekinian, yaitu teori yang dikemukakan Huntington yaitu *pertama, subjective civilian control* yaitu militer sebagai alat pertahanan, *kedua, objective civilian control* yaitu mengakui adanya profesi militer seperti halnya profesi dokter, insinyur dan lain sebagainya. Stepan menambahkan *Military is the new professionalism of internal security and national development*, yang berarti militer adalah profesionalisme baru dari pemisahan internal dan pembangunan nasional, Teori ini juga dianut oleh negara-negara berkembang yang merdeka setelah perang Dunia II.

Adanya anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa militer harus berpolitik karena mereka merasakan kegagalan beberapa pemimpin sipil setelah era kemerdekaan 1945, dan hanya melalui kekuatan militerlah stabilitas suatu bangsa akan dapat diwujudkan guna mengatasi kekacauan politik. Kontradiksi dengan fenomena di atas, sebagian masyarakat menilai pihak sipil lebih responship dan cenderung reaktif sebagai akibat dari trauma akan supremasi militer dimasa ORBA, terutama pada isu yang masih melibatkan TNI pada jabatan sipil. Pada tahun 2019 pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan wacana yang ingin menambah pos jabatan baru bagi perwira tinggi di internal maupun di kementerian. Hal tersebut langsung direspon dengan banyaknya kritik oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, salah satunya dari Direktur Imparsial, Al Araf menilai rencana tersebut tidak tepat, alasannya

penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI.

Reaksi serupa berlanjut dengan dengan intervensi sipil terhadap UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya terhadap pasal 17 yang menyatakan “*Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun*” dan “*Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung*”. Hal itu dinilai akan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI sebagaimana yang terjadi pada era Rezim Suharto.

Opini pro dan kontra yang berkembang ini dinilai merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan dan kepercayaan diri pemerintahan sipil yang kurang, dalam melanjutkan agenda reformasi, kecenderungan itu dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi antara lain: *pertama*, pada awal reformasi terjadi peristiwa lepas Timor Timur dari NKRI dan membentuk negara baru yang bernama Timor Leste di era pemerintahan Presiden B.J Habibie yang menggantikan Presiden Suharto. *Kedua*, pelibatan purnawirawan TNI di kancah partai politik dan pemerintahan yang dapat menimbulkan kesan bahwa pemimpin Indonesia, utamanya kalangan sipil, selalu berupaya menjaga persoalan keseimbangan, disamping juga oleh persoalan lemahnya kepemimpinan sipil dan keputusan ini merupakan hal yang salah dan keliru tetapi tetap dipelihara.

Yang pada dasarnya menafikkan realitas bahwa militer yang dibutuhkan oleh pemerintah sipil dalam hubungan yang demokratis adalah militer yang profesional dalam bidangnya, bukan militer yang ikut campur dalam urusan kekuasaan dan kepentingan politik. Semestinya reformasi

internal TNI tetap dipertahankan, serta pemimpin sipil sudah semestinya membuktikan juga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban, dan menjadi pemimpin sipil yang kuat secara personal.

Hal lain juga yang dapat mempengaruhi HSM pada era reformasi dalam mendukung profesionalisme militer karena sampai pada saat ini, pihak sipil belum dapat mewujudkan postur TNI yang ideal karena minimnya dukungan anggaran militer yang disetujui oleh DPR. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan pembangunan kekuatan alat pertahanan terganggu, porsi latihan kurang, kesejahteraan prajurit pun masih rendah, sehingga berujung pada kurang profesionalnya militer di Indonesia yang dapat menjadi sikap *praetorianisme*.

Kendala lain yang terjadi dikarenakan perjalanan historis sejak kelahiran TNI di Indonesia, di mana para perwira militer bergabung di dalamnya bukan dimotivasi oleh karier kemiliteran, melainkan banyak dilandasi oleh semangat untuk melawan penjajahan dari penelitian Crouch (1998). Hal inilah yang menjadi dasar sulitnya peran TNI lepas dari kepentingan politik karena sejak kelahirannya, institusi ini telah memegang peranan yang sangat vital dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Faktor ini juga dapat mengganggu tercipta kondisi HSM yang harmonis dan memiliki kekuatan dalam melanjutkan cita-cita perjuangan luhur bangsa Indonesia.

Hubungan Sipil Militer yang diharapkan

Jika pada saat sekarang kita selalu mendengar tentang dikotomi antara sipil dan militer, mari kita sadarkan bersama bahwa peringatan tersebut adalah bentuk *early warning system* kepada para anak bangsa, yang dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi diri, belajar dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa atau bangsa ini bisa belajar dari pengalaman negara lain, dalam menata kembali HSM dalam konteks kehidupan bernegara ke arah lebih baik dengan

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga memunculkan arti penting hubungan kerjasama sipil militer secara harmonis.

Pada masa Perang Dingin, ideologi politik dunia cenderung memperbolehkan adanya keterlibatan militer dalam politik yang berakibat pada dominasi militer dalam kekuasaan di banyak negara di berbagai belahan dunia. Namun pasca perang dingin peran militer secara perlahan mulai menurun dan mulai muncul seruan bahwa militer harus kembali ke barak. Kecenderungan ini dapat kita lihat di berbagai negara di Amerika Latin, seperti Brasil, Argentina, dan Chili (Latuconsina 2008).

Isu HSM diawali dengan tahap krisis di hampir semua negara. Dua kubu yang agak berbeda “naluri” (dan emosionalnya) maupun persepsi tentang ancaman, cara mengatasi dan kepekaannya terhadap aktor/non-aktor yang mungkin berpeluang menjadi tantangan sampai dengan ancaman. Terkait dengan hal tersebut, Budiman (2014), menyatakan, “Bisa juga diawali karena kecurigaan atau ketidakpercayaan antar dua kubu, apalagi kalau salah satu kubu merasa terancam kepentingannya. Profesi etika militer yang lebih cenderung pesimistis, kolektivistis, orientasi pada kekuasaan, mendewakan sejarah, nasionalistik, pasifis dan instrumentalistis, dan kalimat itu semua bisa diwakili dengan dua kata: “realistik dan konservatif”.

Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu tegaknya supremasi sipil atau kontrol sipil terhadap militer. Kontrol atau supremasi tidak diartikan setara dengan komando, namun kontrol diartikan lebih dekat dengan kebijakan. Artinya produk kebijakan elit sipil (pemerintah) khususnya yang berkepentingan dengan strategi keamanan nasional yang telah diatur dalam “kebijakan” elit sipil, sebagai konsekuensinya akan dilakukan oleh militer, Kontrol sipil tersirat keinginan untuk menjamin strategi pertahanan nasional, oleh karena itu semua instansi terkait pertahanan nasional

adalah subordinasi tradisi nasional, nilai, kebiasaan, kebijakan pemerintah dan institusi sosial maupun ekonomi.

Studi kasus HSM yang dapat dijadikan model pembelajaran bagi bangsa ini adalah ketika terjadi Aksi Teror Paris di Prancis pada tanggal 13 Nopember 2015, kerjasama cepat antara sipil militer dalam mengatasi krisis sebagai wujud respons bersama: bekerja sama bahu membahu antara sipil dan militer dalam melindungi negaranya. Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan Perancis menerapkan para teknokrat profesional sipil bekerja sama dengan personel militer dalam suatu misi gabungan merespons krisis. Peran dan kontrol parlemen serta arahan strategis dalam urusan regulasi diperlukan untuk melegitimasi kerja sama ini. Pengerahan kekuatan militer jadi kewenangan keputusan politik otoritas sipil yang berdaulat, yang lingkup penugasan militer pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis. Interaksi sipil dan militer mengenal tiga elemen: 1. *bertukar informasi kapasitas*, 2. *membangun tim kerja dan pelatihan bersama lintas sektor sipil dan militer*, 3. *menyusun program bersama*. Mereka menyadari faktor penting dalam manajemen krisis adalah kemampuan mengambil keputusan cepat guna mengatasi krisis dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan seluruh kekuatan pertama yang ada. Semua unit pendukung kedaruratan harus cepat dimobilisasi ke daerah krisis.

Secara universal Perancis mengenal dua tipe misi militer dan sipil bekerja sama. Dalam misi kemanusiaan disebut *humanitarian action*, sedangkan misi politik negara disebut *military action*. Peran militer bersifat *ultima ratio*, bukan penentu akhir, melainkan menjadi elemen utama negara untuk menyelamatkan dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada kondisi krisis.

Dari acuan teori, pengalaman sejarah bangsa ini dan studi kasus yang telah didiskripsikan di atas dapat dipahami dan dimengerti bahwa kita tak boleh terkendala faktor psikologis dan traumatis masa lalu yang

membuat kita terkukung dalam situasi yang sulit untuk berkembang dan upaya mensejajarkan diri dengan bangsa lain, dengan lebih bijak memandang perlunya integrasi nasional menghadapi tantangan masa depan. Masing-masing komponen bangsa baik itu sipil maupun militer memahami profesionalisme tugas yang diemban dan saling menghormati, tidak saling curiga dan mengembangkan sikap saling percaya yang pada akhirnya, menyadarkan kita bahwa selaku anak bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang sama. Menempatkan kepentingan nasional (*national interest*) diatas segalanya, demi keberlangsungan hidup matinya suatu bangsa dan negara Indonesia tercinta, dimana kepentingan nasional itu menjamin tetap berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila yang memiliki identitas, integrasi dan integritas. Perbedaan yang terjadi antara sipil militer pada akhirnya dapat dijadikan kekuatan bangsa bila didasari oleh semangat nasionalisme yang kuat.

Dalam era masyarakat madani, masa kini dan mendatang, kerja sama sipil dan militer menempati ruang yang luas. Indonesia sudah membangun peta jalan kerja sama mutualistik dan merevitalisasi peran militer. Tentunya kita tak bisa berhenti, bahkan diharapkan terus dilakukan optimalisasi dan sistematisasi oleh negara.

Kecurigaan elit sipil tentang “kembali” kekuatan otoriter atau kekuatan militer yang diutilisasikan oleh “penguasa” sudah jauh berkurang, dengan adanya kenyataan elit militer yang sudah mulai memahami arti, proses berdemokrasi serta keseimbangan sipil militer dan sebaliknya elit sipil juga harus mulai memahami arti, peran dan fungsi organisasi TNI lebih detail, dalam rangka memudahkan debat dan diskusi antara elit sipil dan militer.

Bagi Indonesia, sejak Reformasi 1998 hingga terwujudnya relasi sipil militer yang demokratis harus dilakukan pemantauan secara terus menerus sesuai dengan *agency theory* yang dilakukan di negara-negara yang

perkembangan demokratisasinya sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Pemantauan yang dilakukan harus bersifat terus-menerus (*day to day*) dan berkesinambungan (*continue*) demi memastikan bahwa hubungan ini akan dapat terbentuk dan berjalan sesuai relnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pasang surut hubungan sipil militer di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, pro dan kontra, kontradiksi, dikotomi hubungan kerjasama sipil militer yang terjadi, nyatanya membawa Indonesia tetap dapat memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan saat ini, walaupun dengan dinamika perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Namun kondisi ini bukan menjadikan suatu teori pembenaran bila hubungan yang kurang harmonis antara sipil militer tidak berdampak pada instabilitas pertahanan keamanan, politik, ekonomi serta ideologi suatu negara.

Sudah saatnya HSM dikelola dan diatur secara baik menurut kaidah-keilmuan karena HSM merupakan kunci yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan hidup dan matinya suatu bangsa, oleh karena itu segenap komponen bangsa harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu setiap usaha tindakan para elit bangsa selalu mengacu kepada kepentingan nasional, cita-cita dan tujuan nasional.

Seluruh elemen bangsa tidak hanya TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI. Sinergitas antara elemen bangsa dibutuhkan dalam membangun bangsa atau negara. Diperlukan kearifan bagaimana mengharmonisasikan kedua kekuatan “lunak” dan “keras” ini menjadi suatu kenyataan untuk mewujudkan kekuatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- [2] Sri Sundari (2017). *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta- Terakata.
- [3] Samuel P Huntington (1957). *The Soldier and State The Theory And Politic Of Civil Military Relation*. The Belknap Press Of Harvard Univercity Press.
- [4] S. Andreski (1980). On the peaceful disposition of military dictatorships. *The Journal of Strategic Studies*, 1980 - Taylor & Francis.
- [5] Fathullah Syahrul, Muh. Abdi Gocing (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*. Agustus 2020.
- [6] H. Budisantoso. S (1999). Hubungan Sipil Militer Yang Harmonis dan Sinergik Dalam Negara Kesatuan R.I. *Jurnal Ketahanan Nasional IV*, (2), Agustus 1999.
- [7] Efriza Riza (2019). Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi *Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589* 167.
- [8] Sjafrie Sjamsoeddin (2015). *Kerjasama Sipil Dan Militer, Belajar Dari Tragedi Paris*. Media Informasi Kementerian Pertahanan Wira, Volume 57 / No. 41 / November - Desember 2015.
- [9] Sutopo Purwo Nugroho, Suprpto, Tika Savitri Pandanwangi (2016). *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015)*. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 7, No. 2 Tahun 2016 Hal. 103-110*.
- [10] Budiman Djoko Said (2012). Menakar Ulang Hubungan Sipil-Militer (HSM). *Forum Kajian Pertahanan Maritim*.
- [11] David Setiawan, Christopher Octavianus, Demas Janis, Guguh Winadi, Yanuar Abdullah, Taufik Umasugi, Handika Suyut (2013). Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil Di Indonesia. *Jurnal Global & Policy Vol.1, No.1, Januari - Juni 2013*.
- [12] Tri Wibowo BS. *Sejarah & Perkembangan Sosiologi Militer*. academia.edu
- [13] Giri Satrio, I Wayan Midhio, Deni D.A.R (2018). *Strategi Kerjasama Sipil Dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi Di Provinsi Jawa Barat)*. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Agustus 2018, Volume 4, Nomor 2*.
- [14] Yuddy Chrisnandi (2004). *Reformasi internal ABRI: menuju hubungan sipil-militer baru di Indonesia*. Universitas Indonesia Library UI - Disertasi (Membership).
- [15] Yusa Djuyandi (2010). *Membangun Hubungan Sipil - Militer di Era Demokrasi*. Detiknews.
- [16] Alfahjri Sukri (2020). *Perbandingan Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia Pada Masa Abdurrahman Wahid Dengan Erdogan Di Turki Mhd. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 130 Vol. 5, No. 2, 2020*.
- [17] Olivia Prastiti dan Matthew Alexander (2018). *Dwifungsi dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi*.
- [18] Asrudin Azwar, Mirza Jaka Suryana (2021). *Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa*. *Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 1 – Februari 2021*.
- [19] Yusa' Farchan (2021). *Netralitas TNI pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer*. *Jurnal Adhikari | Volume 1 Nomor 01 | Juli 2021 | Page: 42-51*.
- [20] Koesnadi Kardi (2014). *Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia*. : *Jurnal Sosiologi , Vol. 19, No. 2, Juli 2014: 231-256*.

-
- [21] Nur Aliyah Zainal (2013). Hubungan Sipil-Militer Di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013.
- [22] Afrizal Hendra (2021). Bahan Pelajaran Materi Sistem Kebijakan Strategi Nasional Submateri Hubungan Sipil Militer. Fakultas Strategi Pertahanan Prodi Strategi Perang Semesta.
- [23] <https://tniad.mil.id/bangun-bangsa-tanpa-dikotomi-sipil-militer/>
- [24] <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/23/18000001/Kerja.Sama.Sipil.dan.Militer?page=all>
- [25] <https://nasional.tempco.co/read/1172672/tani-kebanjiran-jenderal-tanpa-jabatan/full&view=ok>
- [26] <https://id.wikipedia.org/wiki/Dwifungsi>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN